

*SKRIPSI*

**KLAIM WILAYAH BUNGKA TODDO DI KALANGAN MASYARAKAT  
NELAYAN DANAU TEMPE**

**HARTONI**

**E041171506**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**KLAIM WILAYAH BUNGKA TODDO DI KALANGAN MASYARAKAT  
NELAYAN DANAU TEMPE**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik  
Pada Departemen Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin*

**HARTONI**

**E041171506**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**KLAIM WILAYAH BUNGKA TODDO DI KALANGAN MASYARAKAT  
NELAYAN DANAU TEMPE**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**HARTONI**

**E041171506**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 18 April 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Pembimbing Utama,

Menyetujui,

Pembimbing Pendamping,

Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D

Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si.

NIP 196212311990031023

NIP 197912382008122002

Mengetahui,  
Ketua Departemen  
Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D

NIP 196212311990031023

**HALAMAN PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**KLAIM WILAYAH BUNGKA TODDO DIKALANGAN MASYARAKAT  
NELAYAN DANAU TEMPE**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**HARTONI**

**E041171506**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada  
Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
Makassar, Senin 18 April 2022.

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D (.....)

Sekretaris : Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si (.....)

Anggota : Dr. Phill Sukri, S.IP, M.Si (.....)

Anggota : Dian Ekawaty, S.IP, MA (.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARTONI  
NIM : E041171506  
Program Studi : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

"**Klaim Wilayah Bungka Toddo Dikalangan Masyarakat Nelayan Danau Tempe**" adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 April 2022

Yang menyatakan,

  
HARTONI

## ABSTRAK

**Hartoni, E041171506. Klaim Wilayah Bungka Toddo di Kalang Masyarakat Nelayan Danau Tempe. Di bawah Bimbingan Andi Yakub dan Sakinah Nadir**

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. serta untuk menopang kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Pada Kab. Wajo ini terdapat sumber daya alam melimpah yang keterlibatan pihak pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayahnya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan mengenai pengelolaan sumber daya alam tidak lepas dengan implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah Kab. Wajo dalam mengatasi permasalahan terkait perluasan wilayah dengan teknik penangkapan secara tradisional yang dinamakan bungka toddo di danau tempe. Penelitian ini menguraikan mulau dari pemilihan lokasi, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data yang sangat membantu dalam penelitian ini. Untuk lokasi dalam penelitian ini di Kec. Sabbangparu yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Sehingga penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Sehingga dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawan car mendalam sekaligus dokumentasi untuk menungjang kejelasannya hasil dari penelitian tersebut.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa langkah pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat khususnya bagi nelayan, adapun implementasi kebijakan tersebut sudah dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh masyarakat dengan harapan terciptanya kondisi kestabilan sumber daya alam sekaligus yang menunjang kesejahteraan masyarakat Kab. Wajo, meski begitu beberapa aspek dalam permasalahan awal kemudian mengarah pada permasalahan baru dikarenakan pihak pemerintah yang mulai lalai dalam menjalankan pengawasan pengelolaan sumber daya alam.

**Kata Kunci** : Kebijakan, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Implementasi kebijakan.

## **ABSTRACT**

**Hartoni, E041171506. Bungka Toddo Area Claims Among the Lake Tempe Fishermen Communities. Under the Guidance of Andi Yakub and Sakinah Nadir**

*Natural resources are everything that comes from nature that can be used to meet the needs of human life. and to sustain human life. Natural resources aim to improve human welfare by developing and utilizing existing natural resources. in the district. Wajo has abundant natural resources where the involvement of the government has the authority to manage its own territory. The authority of local governments to overcome problems regarding natural resource management cannot be separated from the implementation of policies issued by local governments.*

*This study focuses on how the implementation of local government policies Kab. Wajo in overcoming problems related to area expansion with a traditional fishing technique called bungka toddo in Lake Tempe. This study describes the selection of locations, types of research, data collection techniques, and data analysis techniques that are very helpful in this research. For the location in this study in Kec. Sabbangparu using descriptive qualitative research. So that this descriptive qualitative research is a research with a case study method or approach (case study). So that the data collection technique uses in-depth interviews as well as documentation to support the clarity of the results of the research.*

*Study indicate that the government's steps in issuing a policy have a significant impact on the community, especially for fishermen groups, while the implementation of the policy has been implemented to by the entire community with the hope of creating a stable condition of natural resources which can at the same time support the welfare of the people of Wajo Regency. However, some aspects of the initial problem then lead to new problems because the government has begun to neglect to supervise the management of natural resources.*

**Keywords:** *Policy, Natural Resource Management, Implementation policy.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul “KLAIM WILAYAH BUNGKA TODDO DI KALANGAN MASYARAKAT NELAYAN DANAU TEMPE”. Penulisan usulan penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyusunan skripsi pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih karena skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Hartono dan Sulfiani yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi senantiasa mendidik, menyanggahi dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati yang tidak pernah didapatkan oleh orang lain. Termasuk saudara penulis, Muh. Asrul dan Muh. Fadli terima kasih atas doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D dan Dr. Sakinah Nadir, M.Si selaku dosen pembimbing yang



telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis.

Dalam hal ini untuk kegiatan penyusunan skripsi penulis tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak baik materil maupun non-materil. Sehingga kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dwi Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku dekan FISIP UNHAS yang telah membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, M. Si, P.Hd, Dr. Suparman Abdullah, M,Si, dan Dr. Hasrullah, M.Si, selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS yang telah memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik
4. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, P.Hd, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Program Studi Ilmu Politik.

5. Seluruh Dosen pengajar Prof. Armin, M.Si; Prof. Muhammad, M.Si; Dr. Muhammad Saad, MA; Dr. Phil. Sukri, M. Si, P.Hd; Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si; Dr. Ariana Yunus, M.Si; Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D; Dr. Sakinah Nadir, M.Si Dr. Imran, M.Si; Andi Naharuddin, S.IP,M.Si; Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si; Zulhajar, S.IP, M.Si; Endang Sari, S.IP, M.Si; Hariyanto, S.IP, M.A; Ummi Suci Fathiah B, S.IP, M.Si. terima kasih atas ilmu dan arahnya yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh pegawai dan staf Departemen Ilmu Politik , khususnya Pak Hamsa dan Ibu Musriati yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
7. Pegawai Perpustakaan Universitas Hasanuddin yang telah senantiasa menyediakan waktu dan tempat untuk penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. Selaku Bupati di Kab. Wajo beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi sistem pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Kab. Wajo khususnya di Danau Tempe.
9. Bapak Ir. H. Nasfari. Selaku Kepala Dinas Perikanan Kab. Wajo yang sudah banyak membantu dan memberi ruang kepada masyarakat

terutama nelayan dalam kesejahteraan masyarakat dan memberikan ruang untuk pengembangan pengetahuan bagi nelayan.

10. Seluruh informan atas kesediaannya sudah menyisihkan waktunya bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang ingin dicari oleh penulis untuk proses penyelesaian skripsi ini terutama Arwan, S.Pi, Darsam Belana, S.E, M.Si, Akbar (sebagai Penyuluh/PPL di Kec.Sabbangparu), Bapak Kano, Bapak Irfan, Bapak Akbar, Bapak Amiruddin, dan Bapak Kaddupe (Nelayan).
11. Kepada teman-teman DEKRIT Angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan serta bantuannya dan doanya selama ini.
12. Terima kasih kepada Dhestiani Aisyah Putri yang senantiasa memberikan dukungan dan doa serta menemani penulis dalam pengerjaan Skripsi ini.
13. Terima kasih kepada Muh. Renaldi yang telah membantu dalam pengambilan data-data dalam kelengkapan skripsi ini.
14. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi yang tidak sempat disebutkan satu persatu namanya.

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Amin. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Amin

Makassar, 18 April 2022

Hartoni

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Literatur Review .....	10
2.2 Tinjauan Teoritis .....	13
2.2.1 Perspektif Sumber Daya Alam .....	14
2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan .....	17
2.3 Konsep Umum Bungka Toddo .....	22
2.4 Skema Pikir .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe dan Jenis Penelitian .....	28
3.2 Lokasi Penelitian .....	31
3.3 Jenis Data .....	32
3.3.1 Data Primer.....	32
3.3.2 Data Sekunder.....	32

3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.4.1 Wawancara .....	33
3.4.2 Arsip/Dokumentasi .....	34
3.5 Informan .....	35
3.6 Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Danau Tempe .....	38
4.1.1 Batas Administrasi .....	38
4.1.2 Danau Tempe .....	38
4.2 Kehidupan Masyarakat Sekitar Danau Tempe .....	42
4.3 Permasalahan Teknik Penangkapan Ikan .....	44
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Permasalahan Pengelollan Sumber Daya Alam .....	50
5.1.1 Peran Bupati Wajo Dalam Pelaksanaan Kebijakan .....	52
5.1.2 Peran Dinas Perikanan Terkait Pelaksanaan Kebijakan ..	54
5.1.3 Peran Penyuluh Terhadap Pelaksanaan Kebijakan .....	56
5.2 Respon Masyarakat Terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan .....	58
5.2.1 Respon Pemilik Bungka Toddo Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan .....	58
5.2.2 Respon Nelayan Kec. Sabbangparu .....	60
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
6.1 Kesimpulan .....	64
6.2 Saran .....	67
6.3 Kontribusi Penelitian .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Daftar Nama-nama Informan

Tabel 2. Daftar nama menggunakan alat tangkap secara tradisional yang dinamakan *Bungka Toddo*.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Dokumentasi 1. Wawancara dengan Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si.  
(Selaku Bupati Wajo)

Dokumentasi 2. Wawancara dengan Ir. H. Nasfari ( Selaku Kepala Dinas  
Perikanan)

Dokumentasi 3. Wawancara dengan Akbar ( Selaku Penyuluh  
Kec.Sabbangparu).

Dokumentasi 4. Wawancara dengan Arwan, S.Pi, (Selaku orang yang  
terlibat dengan konflik di daerah tersebut).

Dokumentasi 5. Wawancara dengan Nelayan (bersentuhan langsung  
dengan Sumber Daya Perikanan).

Dokumentasi 6. Pertemuan langsung dengan nelayan yang dihadiri oleh  
Bupati Wajo untuk meningkatkan kestabilan danau tempe.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian ini tentang politik sumber daya alam terkait sumber daya perikanan. Fokus penelitian ini terletak pada upaya pemerintah daerah Kab. Wajo mengatasi permasalahan terkait klaim wilayah *Bungka Toddo* di Kalang Masyarakat Nelayan Danau Tempe. Dalam mengatasi permasalahan klaim wilayah *Bungka toddo* Pemerintah Kabupaten Wajo berdasarkan kewenangan yang dimilikinya mengeluarkan peraturan daerah terkait penguasaan serta pengelolaan sumber daya alam. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah daerah Kab. Wajo tentang pengelolaan sumber daya perikanan terkait teknik penangkapan ikan secara tradisional yang dinamakan *bungka toddo*.

Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, Akan tetapi sumber daya alam bisa mencakup air, udara, lahan, minyak, ikan, hutan, danau dan lain-lain yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karenanya itu ketika dalam suatu wilayah memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah maka sumber daya alam (SDA) seharusnya dikelola secara baik



dan benar agar dapat memberikan manfaat kepada manusia secara maksimal dan lestari. Adanya sumber daya alam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Dalam pemanfaatan sumber daya alam senantiasa memberi dampak positif (manfaat) ketika sumber daya alam dimanfaatkan secara semestinya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebaliknya sumber daya alam akan berdampak negatif (resiko) dalam hal ini sumber daya alam yang tidak bisa dikelola dengan baik akan berdampak buruk pada kuantitas dan kualitas SDA itu sendiri, karena SDA dieksplorasi dan dieksploitasi oleh individu atau kelompok yang ada di dalam suatu wilayah tersebut untuk menguasai sumber daya alam. Dikarenakan Semakin besar manfaat yang akan diupayakan, semakin besar pula resiko yang ada ataupun muncul resiko baru.

Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Keberadaan sumber daya tersebut tidak saja mencukupi kebutuhan hidup manusia, namun juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sumber daya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus penopang sistem kehidupan. Hingga saat ini, sumber alam sangat berperan penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional termasuk di tingkat lokal atau Kabupaten.

Oleh sebab itu, sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah harus digunakan dan dikelola dengan semestinya dikarenakan pemerintah daerah memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola sumber daya alam sendirinya yang sesuai dengan pemerintah dalam UUD 1945, yang dimana telah mengamanatkan suatu bentuk pemerintahan daerah.<sup>1</sup> kemudian mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>2</sup> Namun demikian, amanat pelaksanaan pemerintahan daerah melalui kebijakan desentralisasi dalam praktik implementasinya tidaklah mudah.

Pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Bahwa dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, rumusan Pasal 18 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut : Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

<sup>2</sup> Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Republik Indonesia. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Oleh sebab itu, dengan pembahasan terkait hal yang sebelumnya dibahas maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana dengan ini Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikarenakan dalam hal ini Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Dengan ini pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pasal 17 Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan ini Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 1 wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Oleh sebab itu, adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka salah satu daerah yang terdapat sumber daya alam diambil dan harus dimanfaatkan untuk menungjang kesejahteraan masyarakat. Daerah tersebut yaitu Kabupaten Wajo yang sumber daya alamnya disebut danau tempe. Sumber daya alam yang terdapat diwilayah tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggantungkan diri kepada sumber daya alam tersebut dan menjadi mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana masyarakat yang berada di sekitar danau banyak sebagai nelayan agar bisa bertahan hidup dan termasuk ketika musim hujan.

Salah satu peranan yang paling penting dari sumber daya alam yang letaknya di Kabupaten wajo menjadi salah satu objek yang terdapat sumber daya perikanan dengan kondisi sangat strategis serta sangat indah dan menjadi salah satu objek andalan bagi nelayan untuk menangkap ikan. Oleh sebab itu, adanya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mengatur sumber daya alam yang cukup melimpah ini, di harapkan pemerintah Kabupaten Wajo bisa mengatasi permasalahan yang terjadi mengenai perluasan wilayah tangkap yang begitu luas dengan menggunakan alat tangkap secara tradisional yang dinamakan *bungka toddo*. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan mengatur sumber daya tersebut agar bisa di akses

dan bisa dinikmati secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya alam tersebut agar bisa dinikmati nelayan sekitar danau memiliki alat tangkap tersendiri salah satunya dinamakan *bungka toddo*. *Bungka toddo* sendiri merupakan upaya penangkapan ikan dengan membentuk suatu areal tertentu pada wilayah danau. Akan tetapi, ada permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut terkait penguasaan wilayah tangkap dengan teknik penangkapan ikan secara tradisional yang dinamakan *bungka toddo* dalam hal ini permasalahan tersebut nelayan pengguna alat tangkap antara *pakkajallelle* atau nelayan biasa yang mengandalkan alat tangkap yang biasa disebut dengan *landrak*, *jabba besi* dan lain sebagainya, terdapat konflik dengan nelayan pengguna alat tangkap yang disebut *bungka toddo*.

Adanya permasalahan tersebut dikarenakan dominasi wilayah Danau sebagian besar itu berada di *bungka toddo* sekaligus area potensial yang dimiliki. Sehingga, nelayan yang alat tangkapnya itu berupa *pakkajallelle* tidak bisa masuk di area *pabungka toddo*. Sekaligus adanya permasalahan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat sekitar karena luasnya berhektar-hektar yang dikuasai yang lebih parah tidak ada tempat bagi nelayan kecil mencari ikan dan tidak adanya jalur transportasi bagi nelayan.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Wajo yang memiliki kewenangan untuk mengelola dengan baik sumber daya

alam mengeluarkan kebijakan yang mengatur sumber daya alam tersebut agar bisa di akses atau dinikmati secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar dikarenakan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan mengenai penguasaan wilayah yang begitu luas dengan teknik penangkapan ikan dengan *bungka toddo* di Danau Tempe. Dalam peraturan pemerintah daerah sumber daya perikanan diatur setegas-tegasnya agar masyarakat tersebut bisa memanfaatkannya khususnya teknik penangkapan ikan yang namanya *bungka toddo* sudah diatur di aturan pemerintah daerah Kab. Wajo No 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Kabupaten Wajo Bupati Wajo, Bab VI Jenis-jenis dan Syarat-syarat Tempat Penangkapan Ikan, Pasal 13 Bungka.

Luas satu unit bungka toddo, di tetapkan maximal 10.000 m<sup>2</sup>.(1.000 Belle/krei) dan harus d Jarak antara *bungka toddo* dengan *bungka toddo* lainnya di tetapkan sekurang-kurangnya 200 meter. setiap satu *Bungka Toddo* terdiri dari satu kelompok yang beranggotakan 5-6 orang, didalam satu kelompok umumnya terdapat satu orang sebagai pemodal, namun juga terdapat yang modalnya merupakan kontribusi dari setiap anggota kelompok.<sup>3</sup>

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut tidak semerta-merta, melainkan tergantung bagaimana implementasi dari pihak pemerintah daerah itu sendiri, apakah semenjak adanya peraturan

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Daerah tentang pengelolaan sumber daya perikanan Kab. Wajo Bupati Wajo

tersebut permasalahan yang ada di danau tempe sudah diatasi. Jadi dapat dikatakan bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi klaim wilayah sumber daya alam yang menggunakan alat tangkap yang dinamakan *bungka toddo* ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana Implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya perikanan dalam mengatasi permasalahan terkait perluasan wilayah tangkap dengan teknik penangkapan *bungka toddo*?
2. Bagaimana respon nelayan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini antara lain :

1. Mendeskripsikan implemementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Wajo tentang pengelolaan sumber daya perikanan dalam mengatasi perluasan wilayah terkait teknik penangkapan ikan secara tradisional yang dinamakan *bungka toddo*.

2. Mengatahui respon masyarakat terkait kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumber daya perikanan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **A. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu politik mengenai Implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Wajo terkait pengelolaan sumber daya perikanan dalam mengatasi permasalahan terkait perluasan wilayah tangkap dengan teknik penangkapan bungka toddo. serta respon nelayan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumber daya perikanan.

##### **B. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan topik bahasan serta sebagai bahan evaluasi yang kemudian dapat menambah wawasan mengenai kemungkinan potensi yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo terhadap pengelolaan sumber daya alam.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian tinjauan pustaka ini ada dua hal yang akan dibahas. Pertama, literatur review yang relevan dengan topik dan fokus penelitian, yang bertujuan untuk mencari kesamaan dan perbedaannya. Kedua, dasar hukum dan yang terakhir terkait dengan tinjauan teoritis yang terdiri dari perspektif, teori, dan konsep digunakan dalam proses analisis hasil penelitian.

#### **2.1 Literatur Review**

Review literatur merupakan salah satu tahapan penting yang perlu dilakukan karena untuk menunjukkan adanya penelitian sebelumnya oleh orang lain yang serupa ataupun mirip terkait dengan implementasi kebijakan dalam mengatasi melimpahnya sumber daya alam. Diperlukan juga untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya atau dengan kata lain tidak mengulang yang sudah ada dan ada unsur kebaruan di dalamnya. Pada bagian ini memuat teori, temuan, dan fokus kajian dari tiap penelitian. Dalam penelitian kali ini, ditemukan beberapa sumber berupa skripsi dan thesis yang memiliki kesamaan tema besar dengan penelitian yang peneliti angkat.

Penelitian yang relevan dengan penelitian tersebut oleh Dwi Kherisna Payadnya Tulisan ini berjudul Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Tinjauan Yuridis Kekhususan

Suatu Daerah Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia), dengan metode penelitian normatif tulisan ini menelaah tentang bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana amanat UUD 1945, Pasal 18 ayat (2), (5) dan (6), Pasal 18A ayat (1) serta UU pelaksananya seperti UU No. 32/2004, UU No. 21/2001 konsideran huruf c, f, g, h, i dan pasal 34, dan UU No. 33/2004 Pasal 11 ayat (1) dan (3), Pasal 19 ayat (1) dan (2). Dalam hal ini pemerintah daerah berwenang dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan asas desentralisasi, karena ini sudah sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU 32/2004.

Artikel yang relevan dengan penelitian ini oleh Ida Nurlinda. Mengenai Kegiatan pembangunan di Indonesia, telah membawa dampak buruk pada kuantitas dan kualitas SDA itu sendiri. Secara normatif, Indonesia telah memiliki UU-PPLH sudah lebih komprehensif mengatur kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan dibandingkan dengan aturan-aturan sebelumnya. Namun, lemahnya tataran implementasi peraturan perundangan di bidang lingkungan tersebut pada kenyataannya menimbulkan sejumlah konflik sosial dan/atau sengketa hukum. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah perlu mengoptimalkan instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 UU-PPLH. Hal tersebut menjadi penting dalam upaya penegakan hukum sebagai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan bagi kepentingan generasi yang akan datang.

Jurnal yang relevan dengan penelitian tersebut atas nama Hasim mengenai Danau Limboto merupakan danau terbesar di Provinsi Gorontalo. Sumberdaya alam ini memiliki kekayaan hayati perikanan yang menjadi sumber ekonomi masyarakat pesisir danau. Disamping itu aktivitas ekonomi perikanan budidaya juga tumbuh pesat di danau Limboto. Danau Limboto merupakan danau terbesar di Provinsi Gorontalo. Sumberdaya alam ini memiliki kekayaan hayati perikanan yang menjadi sumber ekonomi masyarakat pesisir danau. Disamping itu aktivitas ekonomi perikanan budidaya juga tumbuh pesat di danau Limnboto. Danau Limboto memiliki peran strategis bagi provinsi Gorontalo.. Desain penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan pendekatan metodologis ekologi politik. Hasil menunjukkan bahwa regulasi terkait pengelolaan dananu secara umum dan danau Limboto secara khusus masih lemah dalam konteks keterpaduan, harmonisasi, dan fokus masalah.

Penelitian yang peneliti lakukan kali ini memuat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya tersebut Pertama adalah fokus kajian yang diteliti yaitu mengenai cara pemerintah mengatasi permasalahan terhadap penguasaan wilayah tangkap dengan menggunakan teknik *bungka toddo*. Kedua adalah perbedaan antara penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada wilayah sumber

daya alam yang ingin diteliti dan yang ketiga dari segi teori yang digunakan, peneliti menggunakan teori kebijakan, perspektif sumber daya alam sekaligus konsep mengenai implementasi kebijakan yang terfokus pada Sumber Daya Perikanan. Perbedaan yang mencolok pada penelitian ini adalah menjelaskan tentang bagaimana cara pemerintah Kab. Wajo menyelesaikan permasalahan yang terjadi di danau tempe mengenai penguasaan wilayah tangkap.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

Sumber daya perikanan sejatinya merupakan kepemilikan bersama (*common property*) yang dimanfaatkan masyarakat untuk kepentingan ekonomi dan demi kesejahteraan. Namun banyaknya individu dengan kepentingan masing-masing bersaing untuk mendapatkan manfaat memicu eksploitasi sumber daya alam secara maksimal hingga berlebihan. Hal dapat berakibat degradasi lingkungan yang Hardin (1968) sebut sebagai "*Tragedy of Common*". Menurut Satria (2019) bahwa tragedi kerusakan tersebut bukan hanya disebabkan oleh pelaku eksploitasi dari masyarakat sipil sebagaimana penjelasan Hardin, melainkan juga adanya pihak berkepentingan yang berafiliasi dengan kekuatan politik. Untuk itu pemerintah daerah menjalankan kewenangannya untuk memanfaatkan serta pengelolaan sumber daya alam untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya.

### 2.2.1 Perspektif Sumber Daya Alam

Dalam pengertian umum, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Rees (1990) mengatakan bahwa sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumber daya harus memiliki dua kriteria yang pertama yaitu harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan (*skill*) untuk memanfaatkannya serta kedua adalah harus ada permintaan (*demand*) terhadap sumber daya tersebut (Fauzi, 2004).

Dengan demikian dalam pengertian ini definisi sumber daya terkait dengan kegunaan (*usefulness*), baik untuk masa kini maupun mendatang bagi umat manusia. Selain dua kriteria di atas, definisi sumber daya juga terkait pada dua aspek, yakni aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan, dan aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya dan bagaimana teknologi digunakan.

Oleh karena itu, terkait sumber daya alam, Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. serta untuk menopang kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Dengan adanya sumber daya alam maka perlu adanya pengelolaan sumber daya alam tersebut. dalam artian lain bahwa pengelolaan sumber daya alam harus yang baik agar meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri (Fauzi, 2004).

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan suatu hal yang sangat penting dibicarakan dan dikaji dalam kerangka pelaksanaan pembangunan nasional kita. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah sesungguhnya kita dapat melaksanakan proses pembangunan bangsa ini secara berkelanjutan tanpa harus dibayangi rasa cemas dan takut akan kekurangan modal bagi pelaksanaan pembangunan tersebut. Pemanfaatan secara optimal kekayaan sumber daya alam ini akan mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia khususnya di daerah yang terdapat sumber daya alam yang melimpah seperti danau tempe yang berada di wilayah kab.wajo yang dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan penuh untuk mengatur sumber daya alam yang dimiliki.

Mulai dari pekerjaan seperti nelayan atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakukan oleh manusia. Jangankan yang halal, yang harampun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup. sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Termasuk salah satu wilayah memiliki sumber daya alam yang melimpah yang seharusnya sumber daya tersebut bisa memakmurkan masyarakat yang ada disekitar wilayah tersebut. Sekaligus yang bisa dinikmati secara keseluruhan khususnya masyarakat yang pekerjaannya sebagai nelayan yang mata pencahariannya cuman sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau keluarga.

Jadi dalam hal ini adanya pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Yang dimana manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk lainnya, dimana ia dibekali dengan akal dan pikiran, sehingga diharapkan manusia mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan sebaik-baiknya untuk menuju ke sejahteraan. Akan tetapi Seiring dengan peradaban manusia yang semakin maju yang diiringi dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta biaya hidup semakin banyak. Sehingga hal tersebut telah membawah dampak semakin berkurangnya sumber daya alam.

## 2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan

Perdebatan seputar kebijakan berakar pada berbagai gagasan tentang peran pemerintah dalam masyarakat, bagaimana pemerintah harus memenuhi peran itu, dan sumber daya apa yang diperlukan untuk mencapai tujuannya<sup>4</sup>. Menurut Harold D Laswell dan Abraham Kaplan. Kebijakan dimaknai sebagai “*a project program of goals, values and practise*” (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah). Definisi ini lebih menekankan kepada hasil tanpa menjelaskan kebijakan yang pembuat keputusan. Jadi dalam artian bahwa Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijakan karena kalau tidak ada implementasi maka kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.<sup>5</sup>

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminta,1990:327). Istilah

---

<sup>4</sup> Jason, *The Policy Process and Policy Theories* Ch 2, Rice University, 2019, hal 20.

<sup>5</sup> Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, Hal. 5-7.



implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Abdul Wahab, 1997 : 67). Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif bahkan tidak didiamkan dan tidak di laksanakan atau diimplementasikan, akan tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III,1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud.

Sedangkan menurut George C. Edward III (Nawawi, 2009:138) ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Comunication* (Komunikasi)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

2. *Resources* (Sumber Daya)

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia,

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan

implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.

### 3. *Disposition* (Disposisi)

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2007:105) terdapat tiga macam elemen yang mempengaruhi disposisi yaitu pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), intensitas terhadap kebijakan”.

Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi).

Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard operating procedures* atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi

struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

### **2.3. Konsep Umum Bungka Toddo.**

Aktivitas perikanan yang utama adalah penangkapan ikan yang umumnya masih tradisional. Salah satu cara penangkapan ikan tradisional di Danau Tempe yang menjadi andalan masyarakat dan Pemda adalah bungka toddo dan pallawang. Dalam hal ini untuk penangkapan ikan ditemukan dua macam metode menangkap tradisional yakni *bungka toddo* dan *pallawang*. *Bungka toddo* menggunakan eceng gondok dan kangkung yang mengapung. Ketika air danau dangkal, *bungka toddo* diberikan perangkat berupa potongan bambu dihubungkan, ditempatkan mengelilingi eceng gondok di dasar danau. Sedangkan *pallawang* adalah area tertentu di pinggir sungai atau danau yang merupakan milik pribadi, dipagari dan menjadi daerah penangkapan ikan.

Akan tetapi ada alat atau cara menangkap ikan yang memiliki aturan dalam Perda tetapi menurut beberapa hasil studi diketahui tidak ramah lingkungan. Alat tersebut adalah *bungka toddo*, yang merupakan alat tradisional untuk menangkap ikan di Danau Tempe. Dalam hal ini teknik penangkapan ikan secara tradisional yang dinamakan *bungka toddo* menimbulkan konflik yaitu begitu luasnya wilayah yang dikuasai sampai berhektar-hektar sehingga nelayan

kecil tidak bisa masuk untuk menangkap ikan serta jalur transportasi tidak ada.

Oleh karena itu adanya konflik yang terjadi di tengah masyarakat terkait pengelolaan sumber daya perikanan yang ada di danau tempe ini, pihak pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur sumber daya alam tersebut agar sumber daya alam ini yang ada di danau tempe bisa menunjang kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan yang ada di Kec. Sabbangparu sekaligus dari pihak pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya perikanan terkhusus dengan teknik penangkapan ikan secara tradisional yang dinamakan *bungka toddo*. Untuk lebih jelasnya bahwa Cara atau alat tangkap dari *bungka toddo* itu sendiri menggunakan tanaman air sebagai media pengumpul ikan dan ditemukan bahwa tanaman pada *bungka toddo* mempercepat proses pendangkalan danau. Oleh karena itu dari pihak pemerintah Diambil salah satu teknik penangkapan tersebut yaitu Bungka Toddo, ini sudah di atur oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Wajo mengenai ukuran dan jarak setiap *Bungka Toddo*.

Setelah adanya kebijakan yang dikeluarkan pihak pemerintah daerah tercantum dalam hal ini setiap satu *Bungka Toddo* terdiri dari satu kelompok yang beranggotakan 5-6 orang, didalam satu kelompok umumnya terdapat satu orang sebagai pemodal, namun

juga terdapat yang modalnya merupakan kontribusi dari setiap anggota kelompok. Oleh sebab itu harus di ketahui bahwa Ukuran membuat bunga toddo maksimal dua (2) unit dengan luas 10.000 m<sup>2</sup> (1.000 Belle/krei ) panjang 1 krei = 150 cm. dan harus d Jarak antara *bunga toddo* dengan *bunga toddo* lainnya di tetapkan sekurang-kurangnya 200 meter.

Dalam hal ini bahwa teknik penangkapan *bunga toddo* bagi nelayan khususnya pabunga toddo sangatlah produktif dikarenakan dalam menikmati sumber daya perikanan yang ada di danau tempe cuman mengandalkan pasang surutnya air, ketika air naik pabunga memasang alat tangkap tersebut, ketika surut air maka waktunya bagi nelayan pemilik *bunga toddo* memanen hasil yang didapatkan dan hasil panen tersebut sangatlah memuaskan walaupun modal yang dikeluarkan tidak cukup sedikit akan tetapi masih sangatlah produktif sebagai alat tangkap bagi nelayan dan salah satu alat tangkap tradisional.

Akan tetapi dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah, yang paling utama bagaimana implementasi kebijakan tersebut, apakah dengan danya kebijakan yang dikeluarkan sudah tidak ada lagi masalah yang dialami oleh masyarakat khususnya nelayan kecil yang ingin menyangbung hidupnya yang mata pencaharian sebagai nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di danau tempe.

## 2.4. Skema Berfikir

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan klaim wilayah dikalangan masyarakat nelayan didanau tempe. permasalahan yang timbul dilapangan mengenai teknik penangkapan tradisional yang namanya *bungka toddo*, dengan teknik penangkapan ini menimbulkan keresahan masyarakat sekitar karena luasnya berhektar-hektar yang dikuasai, lebih parah tidak ada tempat bagi nelayan kecil mencari ikan dan tidak adanya jalur transportasi bagi nelayan. Oleh sebab itu, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah yang dimana memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, untuk mengatasi hal tersebut langkah awal pemerintah mengatasinya yaitu mengeluarkan suatu kebijakan terkait penguasaan serta pengelolaan sumber daya alam agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dalam menyelesaikan permasalahan klaim wilayah danau tempe peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan bagaimana penerapan atau pengimplementasian aturan pemerintah daerah tentang pengelolaan sumber daya perikanan. Dimana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang sudah ditentukan itu berhubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok



pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pada tahun 2012 No. 4 tentang pengelolaan sumber daya perikanan yang mengikat seluruh masyarakat, yang tujuannya untuk keistabilan sumber daya alam serta menungjang kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk generasi yang akan datang. Sekaligus dengan teknik penangkapan secara tradisional yaitu *bungka toddo* sudah dibatasi wilayah penguasaannya agar nelayan lain bisa menikmati sumber daya alam tersebut tanpa mengabaikan kesitabilannya.

**Bagan 1. Kerangka Pikir**

